

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN BUDAYA POLITIK PARTISIPATIF SISWA-SISWI SLTA DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Nadya Tri Syah Ariesta

NPP. 29.0684

Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.0684@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The lack of understanding of high school students in Bekasi City about politics is feared will give birth to an apathetic society regarding the running of the government. **Objective:** The purpose of this study was to determine the implementation of the political socialization program held by the National Unity and Politics Agency in improving the participatory political culture of high school students in Bekasi City. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of the political socialization program held by the National Unity and Politics Agency in improving the participatory political culture of high school students in Bekasi City. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method and analysis of the implementation according to Grindle's Theory. Data collection techniques were conducted by interview (6 informants), observation, and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of this political socialization activity is sufficient, the implementation is classified as good, it is in accordance with the regulations that govern, although it is still constrained by the refocusing of the budget for the impact of the covid-19. **Conclusion:** The implementation of the Political Socialization Program for high school students in Bekasi City has been going well, this is due to good coordination from the local government with all parties involved. In order to improve the participatory political culture of youth, it is recommended to optimize the use of information technology and social media as well as strengthen the capacity and capacity building of program implementers.

Keywords: Political Socialization; Participatory Political Culture; Political Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya pemahaman para siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi mengenai politik yang dikhawatirkan akan melahirkan masyarakat yang apatis terkait jalannya pemerintahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program sosialisasi politik yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan budaya politik partisipatif siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap implementasi menurut Teori Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (6 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi dalam kegiatan sosialisasi politik ini cukup, pada pelaksanaan tergolong baik sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur, meskipun masih terkendala dengan adanya *refocusing* anggaran dampak dari pandemi *covid-19*. **Kesimpulan:** Implementasi Program Sosialisasi Politik bagi siswa dan siswi SLTA di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari pemerintah setempat dengan seluruh pihak yang terlibat. Guna meningkatkan budaya politik partisipatif pemuda, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta penguatan kapasitas dan peningkatan kemampuan bagi pelaksana program.

Kata kunci: Sosialisasi Politik; Budaya Politik Partisipatif; Partisipasi Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat di wilayah Kota Bekasi yang mencapai angka 2.543.676 penduduk dengan persentase sebesar 72,56% merupakan masyarakat yang berada dalam usia produktif yang berasal dari latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan kondisi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Data tersebut membuktikan bahwa Kota Bekasi mengalami Bonus Demografi yang menunjukkan bahwa keberadaan pemuda mendominasi. Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua dimana di satu sisi dapat menguntungkan sedangkan di sisi lain dapat membawa malapetaka. Masyarakat khususnya pemuda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bagi negara dan tentunya bagi dirinya sendiri. Pemuda memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.¹

Demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, dibutuhkan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara dan jembatan bagi masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan yang dimiliki untuk disampaikan kepada pemerintah. Aspirasi masyarakat perlu disalurkan dengan baik yang kemudian dari aspirasi tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan kunci dalam menentukan arah pemerintahan ke depannya, bentuk partisipasi politik ini sangat penting sehingga dapat memicu tumbuhnya budaya politik di masyarakat. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menumbuhkan partisipasi dari masyarakatnya guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.²

Dalam meningkatkan dan membentuk budaya politik partisipatif di masyarakat, dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik ini sebagai cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi para pelajar yang juga sebagai pemilih pemula yang rentan akan isu-isu politik serta untuk memberikan pemahaman mengenai politik yang nantinya akan meningkatkan dari partisipasi masyarakat khususnya pelajar. Pendidikan politik dapat diberikan lewat berbagai cara, salah satunya dengan Sosialisasi Politik. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat berpikir secara dewasa tanpa ada paksaan dalam dunia berpolitik.

Sehubungan dengan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi mengenai politik yang kemudian akan mewujudkan masyarakat yang berbudaya politik partisipatif, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mengadakan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi pada siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bekasi. Siswa-siswi SLTA yang merupakan pemilih pemula ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena kedepannya mereka sebagai generasi penerus bangsa akan memegang kendali arah pemerintahan sehingga perlu diadakan sosialisasi ini agar para siswa-siswi SLTA memiliki pemahaman mengenai politik, tidak mudah termakan isu yang tidak terbukti kebenarannya karena kurangnya edukasi politik, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap jalannya politik di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi program sosialisasi politik yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yaitu salah satunya adalah pandemi covid-19. dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama adanya covid sehingga program sosialisasi politik sangat sulit untuk dilaksanakan yang mengharuskan kegiatan ini terhenti sementara. Selain itu juga, dampak dari wabah virus corona ini juga menyebabkan rasionalisasi dan efisiensi

¹ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014

anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dimana anggaran untuk program sosialisasi ini dialihkan sementara untuk penanganan covid-19.

Diluar dari masalah virus corona yang sedang melanda Indonesia khususnya di Kota Bekasi, terdapat permasalahan lain yang menghambat jalannya program sosialisasi politik ini seperti persepsi masyarakat khususnya pelajar yang menganggap bahwa kegiatan sosialisasi politik ini tidak menarik. Kemudian dari faktor internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yaitu sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat dalam program ini. Sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sedikit, kemudian mayoritas berada pada usia yang mendekati masa pensiun serta masih adanya pegawai yang belum memiliki kemampuan pengoperasian teknologi. Untuk itu hal-hal yang menghambat pelaksanaan program sosialisasi politik diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai implementator untuk segera diperbaiki dan agar keberlangsungan kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana dan efektif serta dapat mewujudkan budaya politik partisipatif siswa-siswi SLTA Kota Bekasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegrasi Tahun 2018” yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan Iko Deswanda yaitu dipaparkan peran pemerintah selaku pelopor yang menjalankan program monitoring dan program sosialisasi sudah berjalan dengan baik, kemudian peran pemerintah selaku pelaksana sendiri dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal meskipun sumber daya yang dimiliki masih kurang mumpuni. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Estu Supriyadi yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Menumbuhkan Budaya Politik Partisipan Di Masyarakat: Studi Deskriptif Program Sosialisasi Pemilihan Wali Kota Bandung”, memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana usaha yang dilakukan dalam meningkatkan budaya politik partisipan / partisipatif melalui sosialisasi politik yang berpusat pada peran dari Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan budaya politik partisipan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan peranan KPU Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik sudah tercapai melalui program sosialisasi. Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi ini mendapatkan antusias, respon yang baik dan dukungan penuh masyarakat. Hambatan dalam menumbuhkan budaya politik partisipasi yang ditemukan oleh KPU dapat dianalisis dan setelahnya hambatan tersebut dapat diatasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi dari program sosialisasi politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bekasi sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang peran yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi maupun budaya politik masyarakat. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Merilee S. Grindle yang memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi dimana model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat

keputusan dalam konteks politik administratif. Implementasi oleh Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi program sosialisasi politik bagi siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program sosialisasi politik ini sehingga mampu meningkatkan budaya politik partisipatif dari siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi.

II. METODE

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, Kabid Politik Dalam Negeri, Kasubag operasional dan penertiban, Guru dan siswa-siswi SLTA yang mengikuti kegiatan sosialisasi politik. Adapun analisis permasalahan menggunakan teori Implementasi oleh Grindle yang menjelaskan bahwa berhasilnya suatu implementasi dapat ditelaah dari isi kebijakan serta konteks kebijakan itu sendiri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Budaya Politik Partisipatif Siswa-Siswi SLTA

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis dapatkan di lapangan tentang Implementasi Program Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Budaya Politik Partisipatif Siswa-Siswi SLTA di Kota Bekasi dapat dijelaskan menggunakan teori Implementasi Merilee S. Grindle sesuai dengan unsur yang mempengaruhi implementasi program tersebut sebagai berikut:

A. Isi Kebijakan (*Policy Content*)

1. Kepentingan yang Dipengaruhi (*Interests Affected*)

Kepentingan yang terpengaruhi merupakan salah satu bagian dari dibuatnya kebijakan dimana kebijakan yang dibuat memiliki pengaruh kepada lingkungan kebijakan dalam hal ini subjek ataupun objek dari adanya kebijakan tersebut. Dalam hal ini, program sosialisasi politik yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk memberi pemahaman politik akan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat yakni kepentingan siswa-siswi SLTA yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai politik yang merupakan haknya sebagai pemilih pemula. Pembuatan program ini memperhatikan kepentingan dari masyarakat sehingga dengan adanya program sosialisasi politik maka masyarakat sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terutama pelajar sebagai pemilih pemula serta partisipasi yang demokratis akan terwujud demi tercapainya tujuan pembangunan bangsa.

2. Jenis Manfaat (*Types of Benefit*)

Manfaat yang didapatkan oleh kelompok sasaran dari implementasi suatu program yang telah dibuat dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya program tersebut. Dalam program sosialisasi politik ini dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata yaitu menambah pemahaman para pelajar tentang politik. Selain itu, untuk jangka panjang program ini dapat bermanfaat bagi bangsa kedepannya karena dengan program ini mereka memiliki pemahaman

mengenai politik yang akan memacu mereka untuk berpartisipasi dalam politik sebagai generasi penerus yang akan menjalankan roda pemerintahan di masa yang akan datang.

3. Derajat Perubahan (*Extent of Change Envisioned*)

Dengan adanya program sosialisasi politik ini mampu memberikan pencerahan kepada para pelajar mengenai politik yang kemudian dapat menggerakkan kepedulian para pelajar terkait jalannya pemerintahan sehingga membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta mampu meningkatkan tingkat partisipasi mereka pada saat pemilihan umum berlangsung.

4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam hal ini program sosialisasi politik bagi siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi merupakan sebuah keputusan yang tepat, meskipun belum terlaksana sepenuhnya karena dampak dari virus Covid-19 Badan Kesbangpol Kota Bekasi tetap melakukan sosialisasi secara langsung kepada siswa yang sedang magang atau yang sedang melakukan penelitian, selain itu, pemerintah dapat memikirkan cara lain agar program ini tetap terlaksana misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini yaitu melalui Zoom atau Google Meet karena program ini juga merupakan program rutin pemerintah tiap tahunnya.

5. Pelaksana Program (*Program Implementors*)

Pelaksana Program Sosialisasi Politik bagi siswa-siswi SLTA terdiri dari internal Badan Kesbangpol itu sendiri yaitu Kepala Badan sebagai penanggung jawab sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, kemudian pada Bidang Politik Dalam Negeri yang menjadi pelaksana utama dalam kegiatan ini karena program sosialisasi politik ini merupakan salah satu program kerja dari bidang tersebut. Dari pihak eksternal Badan Kesbangpol yang terlibat dalam kegiatan ini yakni KPU dan Bawaslu kemudian juga koordinasi dilakukan dengan Camat untuk masalah perizinan mengadakan kegiatan di wilayah tertentu dan pihak ketiga ikut dilibatkan sebagai penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini.

6. Sumberdaya yang Dikerahkan (*Resources Committed*)

Kedua sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia sama-sama penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu program dibuat. Dalam program sosialisasi politik ini perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan sumberdaya manusia yang apabila masih terdapat kelemahan agar dapat diperbaiki sehingga dapat memaksimalkan pencapaian dari tujuan program tersebut.

B. Konteks Kebijakan (*Policy Context*)

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Terkait dengan kekuasaan dan strategi aktor dalam hal ini adalah pembuat program selaku pemegang tertinggi kekuasaan memiliki wewenang yang besar terhadap jalannya program ini apabila program ini tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan. Adapun pemegang wewenang atau pemilik kekuasaan tertinggi pada program ini adalah Wali Kota Bekasi dengan pelaksana program atau implementor yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi harus memiliki strategi yang baik atau melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan program ini dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan segala kepentingan yang terpengaruhi di dalamnya

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution and Regime Characteristics*)

Keberhasilan implementasi program memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholders yang terlibat dan memiliki peran dalam jalannya program tersebut. Pelaksana program dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

sedangkan dari pihak pelaksana program merasa masih diperlukan upaya peningkatan dan perbaikan dalam rangka tercapainya tujuan dan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat harus ditingkatkan dan terjalin dengan baik demi tercapainya tujuan meningkatnya budaya politik yang partisipatif masyarakat terutama siswa-siswi SLTA sebagai pemilih pemula

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsives*)

Respons terhadap adanya program sosialisasi politik ini memberikan respons yang positif, sehingga kita sebagai masyarakat Kota Bekasi juga harus mendukung penuh agar seterusnya program ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk tingkat kepatuhan dan disiplin terhadap adanya program sosialisasi politik ini dapat dipertahankan atau lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan, karena pelaksana dari program ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Sosialisasi Politik

Faktor pendukung dari implementasi program sosialisasi politik bagi pelajar yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni adanya peraturan yang dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang memungkinkan program ini berjalan dengan baik. Kemudian, sumber dana dan sarana pendukung karena faktor tersebut dapat menunjang keberlangsungan program ini. Sumber dana dalam program ini berasal dari APBD Kota Bekasi serta sarana yang dibutuhkan yaitu banner, snack, materi sosialisasi, lokasi pelaksanaan. Selain itu, koordinasi antar instansi juga mendukung pelaksanaan program sosialisasi politik ini. Pada pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selanjutnya, dalam implementasi program sosialisasi politik ini juga tidak dapat terhindari dari berbagai faktor penghambat seperti mewabahnya virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia, kebijakan yang dikeluarkan berupa himbauan bagi masyarakat untuk tetap di rumah dan menghindari kerumunan menyebabkan program ini terhambat, selain itu anggaran yang digunakan untuk program ini dialihkan untuk penanganan covid-19. Lebih lanjut, selain yang telah disebutkan sebelumnya, persepsi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat berlangsungnya program ini. Pandangan para pelajar mengenai sosialisasi berkonotasi membosankan, sehingga para siswa-siswi SLTA ini enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi politik yang diadakan oleh Kesbangpol Kota Bekasi. Sementara itu, dari internal Badan Kesbangpol Kota Bekasi yaitu sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat kegiatan ini. Kualitas sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sedikit, kemudian mayoritas berada pada usia yang mendekati masa pensiun serta masih adanya pegawai yang belum memiliki kemampuan pengoperasian teknologi komputer dengan mahir.

3.3 Upaya Peningkatan Implementasi Program Sosialisasi Politik

Dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada, beberapa upaya yang dilakukan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi secara langsung dari mulut ke mulut kepada siswa yang sedang magang atau yang sedang melaksanakan penelitian guna menghindari kerumunan dalam rangka menekan angka penyebaran virus corona. Kemudian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan perubahan pada pola pembinaan politik yang sebelumnya selalu mengandalkan APBD Kota Bekasi kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi melibatkan organisasi masyarakat, instansi kampus, dan kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat membentuk strategi yang tepat dalam penyampaian materi program sosialisasi

politik agar dapat menarik minat para siswa-siswi SLTA serta mengadakan pelatihan dasar bagi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama dalam bidang teknologi agar dapat meningkatkan kemampuan pelaksana program sosialisasi politik ini.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Budaya politik partisipatif ini termasuk bagian dari nilai norma bela negara.³ Selain itu, mewujudkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu prioritas yang dirancang oleh Wali Kota Bekasi. Sebagai upaya mewujudkan hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pembangunan politik serta memberikan pemahaman mengenai politik kepada seluruh masyarakat di Kota Bekasi yang nantinya akan menumbuhkan angka partisipasi masyarakat.⁴ Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi pada siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bekasi. Pelaksanaan program sosialisasi politik bagi siswa-siswi SLTA memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih aktif dalam berpartisipasi di bidang politik dan juga menambah wawasan bagi para pelajar mengenai politik. Program Sosialisasi Politik juga merupakan salah satu sarana bagi para pemuda di Kota Bekasi untuk mendapatkan pengetahuan politik. Penulis menemukan temuan penting yakni generasi muda berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya komitmen dari pemerintah setempat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya politik partisipatif, yang didukung dengan adanya dukungan dari masyarakat. Sama halnya dengan temuan Deswanda bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sentral mendorong anak-anak muda untuk berperan aktif dalam pelaksanaan politik pemerintahan di Kota Bekasi seperti menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, memberikan pemahaman tentang politik serta menyadarkan siswa-siswi SLTA akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memfasilitasi kaum muda untuk memahami potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat.⁵ Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat Kota Bekasi, meningkatnya budaya politik partisipan, sehingga mampu menumbuhkan angka partisipasi masyarakat khususnya para pelajar sebagai pemilih pemula secara tidak langsung layaknya penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi yang menemukan peran KPU di Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan melalui program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung.⁶

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Sosialisasi Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam meningkatkan budaya politik partisipatif siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya koordinasi dan komitmen yang baik dari Kesbangpol maupun pihak lain yang terkait terlepas dari beberapa hambatan yang ada, tetapi Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Guna meningkatkan budaya politik partisipatif dari para pemuda ini, disarankan untuk

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara

⁴ Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013

⁵ Estu Supriyadi, Skripsi: *"Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Menumbuhkan Budaya Politik Partisipan di Masyarakat: Studi Deskriptif Program Sosialisasi Pemilihan Wali Kota Bandung."* (Bandung: UPI, 2019)

⁶ Iko Deswanda, Skripsi: *"Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018"* (Riau: Unri, 2020)

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat khususnya siswa-siswi SLTA.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga dilakukan hanya terfokus pada program sosialisasi politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program sosialisasi politik di Kota Bekasi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013
Supriyadi, Estu. 2019. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Menumbuhkan Budaya Politik Partisipan di Masyarakat: Studi Deskriptif Program Sosialisasi Pemilihan Wali Kota Bandung. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia
Deswanda, Iko. 2020. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegrasi Tahun 2018. Skripsi. Universitas Riau